



Radar Bali

Sosialisasi Dana Desa Merujuk UU Nomor 6 Tahun 2014 di Gianyar

Inovasi Bisa Dilaksanakan, Jangan Sampai Kepala Desa Masuk Bui

Berlakunya UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Di satu sisi membuat aliran dana yang dikelola desa semakin besar. Namun bak pisau bermata dua, keraguan muncul ketika Perbekel atau Kepala Desa gagal mengelola dengan baik aliran dana itu.

N. WIDIADNYANA, Gianyar

KETIKA kesalahan terjadi, masalah hukum pun menanti. Untuk itu, kemarin (6/8) Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI, melaksanakan sosialisasi dana desa di Balai Budaya Gianyar. Sosialisasi yang tak hanya dihadiri para perbekel

di Gianyar, tapi juga jajaran terkait Pemkab Gianbyar.

Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto kepada awak media usai pembukaan sosialisasi menyatakan, realisasi dana desa yang mencapai Rp 1,4 per desa, ditarget bisa tercapai pada 2017. Namun untuk mencapai angka tersebut dalam dua tahun lagi, dia akui banyak yang harus dipersiapkan. Salah satunya menyusun formula yang lebih berkeadilan bagi desa. Sehingga tidak ada persoalan muncul, ketika ada desa yang dekat, namun sebagian jumlah yang beda. "Juga kesiapan aparat desa untuk menyerap keseluruhan dana desa. Sebab kami tahu, kalau tataran pemerintahan di atasnya seperti Bupati belum memiliki regulasi dalam menyiapkan APBDes yang kredibel. Tentu juga itu tak terserap,"



NYOMAN WIDIADNYANA/RADAR BALI

TAAT ATURAN: Sosialisasi dana desa di Gianyar bertujuan agar pemanfaatan dana tepat sasaran.

ujarnya. Karena itu seperti katanya, ketika dana desa tahap pertama sudah cair. Penyusunan program

berupa APBDes mesti dilakukan. Karena itu, pihaknya berharap, Pemkab Gianyar juga bisa turut

membantu dalam penyusunan APBDes. Sebagai upaya proses cairnya dana desa tahap kedua. "Sebab dalam hal ini juga ada sanksi, berupa penundaan penyaluran atau pemotongan dana desa. Ketika terjadi kesalahan dalam pengelolaan," tambahnya Disinggung mengenai munculnya kekuatiran bakal memutus inovasi dari kreativitas yang muncul di desa. Dia menegaskan, inovasi tetap bisa dijalankan. Sepanjang pelaksanaannya sesuai kaidah. Oleh sebab itu, dia berharap kreatifitas tidak berhenti karena rasa takut. Tapi ketika kreatifitas itu memerlukan dana, harus ikut pada aturan tata kelola yang benar.

"Makanya peran bupati sangat penting, untuk membuat aturan terkait pengelolaan dana desa. Sehingga pengawasannya nanti bisa berjen-

jang. Mulai pengawasan di desa hingga tataran di atasnya. Supaya saling awas," imbuhnya.

Seperti katanya, dana desa yang disalurkan pada tahap pertama untuk seluruh Gianyar sebesar Rp 7,6 miliar (40 persen) pada 5 Mei lalu. Jumlah tersebut 40 persen dari alokasi dana desa bagi Gianyar di tahun ini, yang sebesar Rp 19,166 miliar. I Gusti Agung Rai Wirajaya, anggota Komisi XI DPR RI, dari yang dia ketahui, banyak kepala desa takut pada akhirnya menjadi temuan yang berujung malasah hukum. "Makanya kami sudah ketemu BPKP dan BPK, supaya dilaksanakan pembinaan. Sehingga ke depan tidak menjadi temuan. Saya sendiri tidak mau ada kepala desa masuk penjara. Apalagi gara-gara kesalahan administrasi," tukas dia. (* /gup)

Edisi : Jumat, 7 Agustus 2015
Hal : 27